**ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**

***ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS FOR ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE IN SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI***

**Rani Amelia Fitra, Delvianti**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Ekasakti

Jln. Veteran Dalam No. 26 B, Padang (25113), Indonesia

**ABSTRACT**

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005 dengan metode analisa kualitatif dan melakukan pengujian hipotesa dengan melakukan uji tanda membandingkan pelaksanaan akuntansi dalam menyajikan Laporan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan PP No. 24 Tahun 2005. Tujuan kedua untuk mengetahui Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan menggunakan Analisa Kuantitatif yang terdiri dari Analisa Neraca dan Analisa Laporan Realisasi Anggaran. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 sampai tahun 2014 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan hasil analisis penyajian Laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dari Uji Tanda didapat h-tabel = 13, h-hitung = 7 kecil dari h-tabel = 13, berarti terima Ho. Maka Hipotesis dapat diterima dengan derajat kesalahan (α) = 5% yang berarti dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Dan hasil perhitungan dari analisis laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi cukup baik jika dilihat dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang terlihat dari posisi asset dimana pertumbuhan tiap-tiap asset yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 memiliki Rasio Effisiensi Belanja yang baik.

**Kata Kunci** : Analisa Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan,

*ABSTRACT*

*The first objective from the study is to know whether the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City have provided good financial reports in accordance with government regulation .No. 24 in 2005 with a method of analysis qualitative and conducting a is hypothesized with test-fired a sign compare the implementation of the accounting in presenting financial report on the council secretariat kota bukittinggi in a government regulation no. 24 years 2005. The second goal to know financial performance the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City by using a quantitative analysis consisting of analysis balance sheet and analysis report the realization budget .The data used was financial report the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City 2012 until the 2014 consisting of the balance and reports the realization budget. The data used was financial report the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City 2012 until the 2014 consisting of the balance and reports the realization budget. Based on the results of the analysis the presentation of financial reports on the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City of assay a sign obtained h-tabel = 13 , h-hitung = 7 smaller than h-tabel = 13 , means received ho .Then a hypothesis can be received with degrees wrongdoing* (α) = 5% *percent which means we can conclude that the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City have provided financial statements with good in accordance with government regulation no. 24 years 2005 And the calculation on from the analysis financial report the council Secretariat DPRD of Bukittinggi City good enough when viewed from financial report the council The council Secretariat DPRD of Bukittinggi City of 2012 up to 2014 having the ratio effisiensi shopping good.*

***Keywords****: analysis of financial reports , financial performance*

**PENDAHULUAN**

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, membawa bangsa Indonesia menuju kepada era keterbukaan yang menjadikan masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sehingga warga negara lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang, salah satunya adalah perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dengan membangun sistem *Good Government Governance* yang kokoh melalui pembangunan standar-standar akuntansi dan keuangan untuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan standar akuntansi sektor publik tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang kuat dan jelas bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi pemerintah harus dilaporkan secara adil, terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

*World Bank* dalam Mardiasmo (2002:18) mendefinisikan *Good Government Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *Legal and Political Framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) Karakteristik pelaksanaan *Good Government Governance* ini meliputi *Participation, Rule of Law, Transparancy, Responsivenesst, Consensus Orientation, Equity, Eficiency, and Effectiveness, Accountability dan Strategic Vision*. Dari Sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik dalam *participant Good government governance* yaitu penciptaan *akuntabilitas public*, *transparansi* dan *value for moner (Economic Efficiency dan Effectiveness*) (Mardiasmo, 2002:18).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang selanjutnya dipublikasikan dan didistribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi serta perwakilan organisasi. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan professional berkelanjutan dan lain-lain. SAP Tahun 2005 membutuhkan harmonisasi dalam berbagai peraturan baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Hari Sabarno (2007:38), transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sedangkan akuntabilitas menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, dalam buku “Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik” (2004:40).

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisa suatu laporan keuangan guna menilai penerapan analisa Laporan Keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipergunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan didalamnya baik itu pihak interen maupun eksteren. Dalam hal tersebut diatas, penulis memilih sebuah studi kasus melalui sebuah penelitian dengan judul ***“Analisa Laporan Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi***”

**RUMUSAN MASALAH**

Berdsarkan uraian dari latar belakang dan motivasi penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sektetariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Laporan Keuangan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014?

**Metode Pengumpulan Data**

Metode untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan membahas dan mempelajari buku-buku, literature, menjadikan Standat Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman standar penyusunan Laporan Keuangan, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Teknik Dokumentasi yaitu melakukakn penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang dapat mendukung dalam penelitian ini seperti: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang didapat dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

**JENIS DAN SUMBER DATA**

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu data yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Data ini berasal dari dokumen/laporan keuangan yang bersumber dari para responden pembuat laporan keuangan.

1. Jenis Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara.Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

**Metode Analisis**

Untuk masalah pertama peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan melakukan uji tanda dengan melakukan perbandingan pelaksanaan akuntansi dalam menyajikan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisa Kulitatif yang digunakan dengan menghimpun fakta dan melakukan pengujian hipotesa. Apabila Laporan Keuangan Sekretariat DPRD telah sesuai dengan PP. 24 Tahun 2005 maka diberi tanda positf (+), dan sebaliknya diberi tanda negatif (-).

Analisa kuantitatif digunakan untuk menjawab masalah kedua yang terdiri dari :

Menurut Mahmudi (2007) dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik, Analisa Laporan Keuangan dalam menilai kinerja:

1. Analisis Neraca, terdiri dari : Analisis Aset terdiri dari :
2. Analisis pertumbuhan tiap-tiap pos asset dalam neraca

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rasio Pertumbuhan  asset lancar | = | (Aset lancar th ke-n - Aset Lancar th ke -n-1) x100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rasio Pertumbuhan  Asset Tetap | = | (Aset Tetap th ke-n - Aset Tetap th ke -n-1) x100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rasio Pertumbuhan  Asset Lainnya | = | (Aset Lainnya th ke-n - Aset Lainnya th ke -n-1) x100% |

1. Analisis proporsi kelompok asset terhadap total asset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Analisis proporsi  Aset lancar | = | Jumlah aset Lancar | x 100% |
| Jumlah aset |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Analisis proporsi  Aset Tetap | = | Jumlah aset Tetap | x 100% |
| Jumlah aset |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Analisis proporsi  Aset Lainnya | = | Jumlah aset Lainnya | x 100% |
| Jumlah aset |

1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Analisis Pertumbuhan Belanja meliputi :

A. Analisis varian belanja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Analisis  Belanja Pegawai | = | Jumlah Belanja Pegawai | x 100% |
| Jumlah Realisasi Belanja |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Analisis Belanja  Barang dan Jasa | = | Jumlah Belanja Barang dan Jasa | x 100% |
| Jumlah Realisasi Belanja |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c. | Analisis Belanja  Modal | = | Jumlah Belanja Modal | x 100% |
| Jumlah Realisasi Belanja |

B. Analisis rasio efisiensi belanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis Efisiensi  Belanja | = | Realisasi Belanja | x 100% |
| Anggaran Belanja |

**Metode Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya kesesuainan hasil kerja antara Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan PP SAP Nomor 24 Tahun 2005, maka penulis menggunakan nilai perbandingan antara h-hitung dengan h-tabel berdasarkan taraf/tingkat kesalahan (α) = 5%. Nilai tanda negatif h-hitung didapat dari jumlah tanda negatif dari uji tanda. Nilai h-tabel didapat dari Tabel Nilai Kritis h pada uji tanda melalui tabel yang telah ditentukan dalam lampiran I dengan ketentuan sebagai berikut:

* 1. Ho ditolak jika h-hitung ˃ h-tabel
  2. Ho diterima jika h-hitung ≤ h-tabel

**Hasil Analisis Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005**

Berikut adalah hasil uji tanda antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

**Tabel 4.1** **Uji Tanda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang**  **Diuji** | **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005** | | **Penyajian Laporan Keuangan pada**  **Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi** | | **Tanda** | **Ket** |
| 1 | Komponen  Laporan  Keuangan | Laporan Realisasi Anggaran | | Laporan Realisasi Anggara | | + | 1 |
|  | Neraca | | Neraca | | + | 2 |
|  | Laporan Arus Kas | | - |  | - | 3 |
|  |  | Catatan Atas Laporan Keuangan | | Catatan Atas Laporan Keuangan | | + | 4 |
| 2 | Basis  Akuntansi | Basis Kas Untuk Laporan Realisasi Anggaran | | Basis Kas Untuk Laporan Realisasi Anggaran | | + | 5 |
|  | Basis Akrual untuk Neraca | | Basis Akrual untuk Neraca | | + | 6 |
| 3 | Unsur-unsur  Laporan  Keuangan | **Laporan Realisasi Anggaran** | | **Laporan Realisasi Anggaran** | |  |  |
|  | - | Pendapatan | - | Pendapatan | + | 7 |
|  | - | Belanja | - | Belanja | + | 8 |
|  | - | Transfer | - | Transfer | + | 9 |
|  |  | - | Surplus/Defisit | - | Surplus/Defisit | + | 10 |
|  |  | - | Pembiayaan | - | - | - | 11 |
|  |  | - | Sisa Lebih / kurang pembiayaan anggaran | - | Sisa Lebih / kurang pembiayaan anggaran | + | 12 |
|  |  | **Neraca** | |  | **Neraca** |  |  |
|  |  | - | Kas dan Setara kas | - | Kas dan Setara kas | + | 13 |
|  |  | - | Investasi jk pendek | - | - | - | 14 |
|  |  | - | Piutang pajak dan bukan pajak | - | - | - | 15 |
|  |  | - | Persediaan | - | Persediaan | + | 16 |
|  |  | - | Investasi Jangka Panjang | - | - | - | 17 |
|  |  | - | Aset Tetap | - | Aset Tetap | + | 17 |
|  |  | - | Kewajiban Jangka Pendek | - | - | - | 19 |
|  |  | - | Kewajiban Jangka Panjang | - | - | - | 20 |
|  |  | - | Ekuitas dana | - | Ekuitas dana | + | 21 |
|  |  | **Catatan Atas Laporan Keuangan** | |  | **Catatan Atas Laporan Keuangan** |  |  |
|  |  | - | Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam  pencapaian target | - | ekonomi makro, kebijakan keuangan , indikator pencapaian target kinerja APBD | + | 22 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | - | ikhtisar pencapaian kinerja keuangan  selama tahun pelaporan | - | Ikhtisar realisasi pencapain target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kota Bkt, | + | 23 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yg dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. | - | Kebijakan akuntansi, basis akuntansi, basis pengukuran, penerapan kebijakan akuntansi | + | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar kuntansi Pemerintahan yg belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan | - | Penjelasan pos-pos laporan keuangan :  pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,  kewajiban, ekuitas dana | + | 25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | informasi tambahan yang diperlukan | - | penjelasan atas informasi non keuangan | + | 26 |
|  |  | - | daftar dan skedul | - | daftar-daftar lampiran | + | 27 |
| 4 | Akuntansi  persediaan | Pengakuan | | Pengakuan | |  |  |
|  | - | persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh | - | persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh | + | 28 |
|  |  |  |  |  |
|  | - | persediaan diakui saat diterima | - | persediaan diakui saat diterima | + | 29 |
|  | - | pada akhir periode persediaan dicatat  berdasarkan hasil inventarisasi fisik | - | pada akhir periode persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik | + | 30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Pengukuran** |  | **Pengukuran** |  |  |
|  | - | persediaan disajikan sebesar biaya perolehan | - | persediaan disajikan sebesar biaya perolehan | + | 31 |
|  |  | **Pengungkapan** |  | **Pengungkapan** |  |  |
|  | - | Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan | - | Kebijakan akuntansi yang digunakan  dalam pengukuran persediaan | + | 32 |
|  |  |  |  |  |
|  | - | kondisi persediaan | - | kondisi persediaan | + | 33 |
| 5 | Akuntansi  Aset  Tetap | Pengakuan | | Pengakuan | |  |  |
|  | - | Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan | - | Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan | + | 34 |
|  | - | Biaya perolehan dapat diukur secara andal | - | Biaya perolehan dapat diukur secara andal | + | 35 |
|  |  | - | Tidak dimaksudkan untuk dijual | - | Tidak dimaksudkan untuk dijual | + | 36 |
|  |  | - | diperoleh dengan maksud untuk digunakan | - | diperoleh dengan maksud untuk digunakan | + | 37 |
|  |  |  | **Pengukuran** |  | **Pengukuran** |  |  |
|  |  | - | dinilai dengan biaya perolehan | - | dinilai dengan biaya perolehan | + | 38 |
|  |  |  | **Pengungkapan** |  | **Pengungkapan** |  |  |
|  |  | - | Kebijakan akuntansi yang digunakan | - | Kebijakan akuntansi yang digunakan | + | 39 |
|  |  |  | dalam pengukuran aset |  | dalam pengukuran aset |  |  |
|  |  | - | kondisi aset tetap | - | kondisi aset tetap | + | 40 |

* 1. **Komponen Laporan Keuangan**

Pada Tabel 4.1 Uji Tanda diatas, komponen Laporan Keuangan yang disajikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mempunyai nilai positif yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara yang bernilai negatif adalah Laporan Arus Kas. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tidak membuat Laporan Arus Kas, karena Laporan Arus Kas dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

* 1. **Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi bernilai positif yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk Neraca.

* 1. **Unsur-unsur Dalam Laporan Keuangan**

Unsur-unsur dalam Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinngi untuk Laporan Realisasi Anggaran yang bernilai positif terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran. Sementara yang bernilai negatif yaitu pembiayaan. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD tidak memiliki pembiayaan.

Untuk Neraca yang bernilai positif terdiri dari Kas, persediaan, asset tetap, ekuitas dana. Dan yang bernilai negative yaitu investasi jangka pendek, piutang pajak, investasi jangka panjang, dan kewajiban. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi bukan SKPD penghasil. Sementara untuk Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD secara keseluruhan format dan isinya telah bernilai positif.

* 1. **Akuntansi Persediaan**

Untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan pada Sekretariat DPRD dimana persediaan diakui pada saat diterima dan pada akhir periode persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Sementara persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan. Dan pengungkapan untuk persediaan memuat kebijakan akuntansi yang digunakan serta kondisi persediaan tersebut.

* 1. **Akuntansi Aset Tetap**

Untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan asset tetap pada Sekretariat DPRD dimana asset tetap diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, Biaya perolehan dapat diukur secara andal, asset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Sementara asset tetap diukur sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan. Dan pengungkapan untuk asset tetap memuat kebijakan akuntansi yang digunakan serta kondisi asset tetap tersebut.

**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui nilai n= 40 dengan nilai h-hitung = 7 untuk tanda negatif dan h-hitung = 33 untuk tanda positif. Dengan n= 40 dan (α) = 0.05, maka dari daftar nilai h kritis untuk uji tanda yang terdapat pada lampiran, didapat h-tabel = 13. Karena h-hitung = 7 kecil dari h-tabel = 13, berarti terima Ho. Maka Hipotesis dapat diterima dengan derajat kesalahan (α) = 5% yang berarti bahwa Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Analisis Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**

1. **Analisis Neraca Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**
2. **Analisis Asset**

Analisis Aset Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dari:

1. Analisis Pertumbuhan Tiap-tiap Pos Aset Dalam Neraca

**Tabel 4.2. Pertumbuhan Aset Sekretariat DPRD**

**Kota Bukittinggi Tahun 2012-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Jumlah** | | **Kenaikan / Penurunan** | |
| **2013** | **2012** | **Jumlah** | **%** |
| **1** | **3** | **2** | **5** | **6** |
| **Aset** | **13,322,750,032.00** | **12,999,210,472.00** | **323,539,560.00** | **2.49** |
| **Aset Lancar** | **8,402,300.00** | **10,442,250.00** | **(2,039,950.00)** | **(19.54)** |
| Persediaan | 8,402,300.00 | 10,442,250.00 | (2,039,950.00) | (19.54) |
| Persediaan Alat Tulis Kantor | 2,769,800.00 | 4,310,650.00 | (1,540,850.00) | (35.75) |
| Persediaan Alat Listrik dan Elektronik | 45,000.00 | 447,600.00 | (402,600.00) | (89.95) |
| Persediaan Barang Cetak | 5,250,000.00 | 5,342,000.00 | (92,000.00) | (1.72) |
| Persediaan Bahan Kebersihan Kantor | 337,500.00 | 342,000.00 | (4,500.00) | (1.32) |
| Persediaan Lainnya | - | - | - |  |
| **Aset Tetap** | **12,958,712,189.00** | **12,656,240,312.00** | **302,471,877.00** | **2.39** |
| Tanah | 3,905,000,000.00 | 3,905,000,000.00 | - | - |
| Peralatan dan Mesin | 6,429,165,589.00 | 6,354,218,012.00 | 74,947,577.00 | 1.18 |
| Gedung dan Bangunan | 2,450,613,000.00 | 2,257,184,000.00 | 193,429,000.00 | 8.57 |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 60,799,250.00 | 47,877,250.00 | 12,922,000.00 | 26.99 |
| Aset Tetap Lainnya | 113,134,350.00 | 91,961,050.00 | 21,173,300.00 | 23.02 |
| **Aset Lainnya** | **355,635,543.00** | **332,527,910.00** | **23,107,633.00** | **6.50** |
| **Jumlah Aset** | **13,322,750,032.00** | **12,999,210,472.00** | **323,539,560.00** | **2.49** |
| **Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012-2013** | | | | |

**Tabel 4.3. Pertumbuhan Aset Sekretariat DPRD**

**Kota Bukittinggi Tahun 2013-2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Jumlah** |  | **Kenaikan/ Penurunan** | |
| **2014** | **2013** | **Jumlah** | **%** |
| **1** | **4** | **3** | **5** | **6** |
| **Aset** | **15,883,549,607.00** | **13,322,750,032.00** | **2,560,799,575.00** | **19.22** |
| **Aset Lancar** | **12,592,200.00** | **8,402,300.00** | **4,189,900.00** | **49.87** |
| Persediaan | 12,592,200.00 | 8,402,300.00 | 4,189,900.00 | 49.87 |
| Persediaan Alat Tulis Kantor | 2,508,700.00 | 2,769,800.00 | (261,100.00) | (9.43) |
| Persediaan Alat Listrik dan Elektronik | 215,000.00 | 45,000.00 | 170,000.00 | 377.78 |
| Persediaan Barang Cetak | 5,352,000.00 | 5,250,000.00 | 102,000.00 | 1.94 |
| Persediaan Bahan Kebersihan Kantor | 226,500.00 | 337,500.00 | (111,000.00) | (32.89) |
| Persediaan Lainnya | 4,290,000.00 | - | 4,290,000.00 |  |
| **Aset Tetap** | **15,267,930,448.00** | **12,958,712,189.00** | **2,309,218,259.00** | **17.82** |
| Tanah | 3,905,000,000.00 | 3,905,000,000.00 | - | - |
| Peralatan dan Mesin | 8,730,572,948.00 | 6,429,165,589.00 | 2,301,407,359.00 | 35.80 |
| Gedung dan Bangunan | 2,492,777,250.00 | 2,450,613,000.00 | 42,164,250.00 | 1.72 |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 17,081,000.00 | 60,799,250.00 | (43,718,250.00) | (71.91) |
| Aset Tetap Lainnya | 122,499,250.00 | 113,134,350.00 | 9,364,900.00 | 8.28 |
|  |  |  | - |  |
| **Aset Lainnya** | **603,026,959.00** | **355,635,543.00** | **247,391,416.00** | **41.02** |
| **Jumlah Aset** | **15,883,549,607.00** | **13,322,750,032.00** | **2,560,799,575.00** | **19.22** |
| **Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2013-2014** | | | | |

* 1. **Pertumbuhan Aset Lancar**

Berdasarkan hasil Pengolahan data pada Tabel. 4.2. dan Tabel 4.3. diperoleh informasi bahwa pertumbuhan asset dari tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 2,49%. Ini artinya pertumbuhan asset mengalami peningkatan dengan jumlah 323.539.560,-. Sedangkan untuk Tahun 2013 sampai Tahun 2014 pertumbuhan Asetnya sebesar 19,22%. Dimana asetnya mengalami peningkatan yang cukub besar dengan jumlah 2.560.799.575,-

Aset Lancar Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi jika dilihat dari persediaan pada tahun 2012 sampai 2013 mengalami penurunan sebesar Rp.2.039.950,- dengan persentase 19,54% . sedangkan pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan persediaan sebesar 49,87% yaitu sebanyak Rp. 4.189.900,- hal ini disebabkan karena persediaan yang dibeli pada akhir tahun masih banyak yang belum digunakan.

* 1. **Pertumbuhan Aset Tetap**

Pertumbuhan asset tetap Tahun 2013 sebesar 2.39% atau Rp.302.471.877,-. Pertumbuhan ini tidak terlalu tinggi karena pada tahun 2013 Sekretariat DPRD tidak terlalu banyak dalam pengadaan Belanja Modalnya.

Sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan asset tetap sebesar 17.82% atau Rp. 2.309.218.259,-. Pertumbuhan asset tetap pada tahun 2014 ini termasuk besar. Karena pada tahun 2014 ini Sekretariat DPRD ada Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Anggota DPRD yang baru dilantik.

* 1. **Pertumbuhan Aset Lainnya**

Aset Lainnya pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi terdiri dari Usulan Barang yang akan dihapuskan semenjak Tahun 2010. Pertumbuhan asset lainnya Tahun 2013 sebesar 6.50% atau Rp.23.107.633,- sedangkan pada tahun 2014 sebesar 41,02% atau 247.391.416,- . Pada tahun 2014 terdapat Ususan Penghapusan Barang Sebesar Rp. 247.391.

1. Analisis Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset

**Tabel 4.4. Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset**

**Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012-2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategori Aset | 31 Desember 2012 | % Dari  Total Aset | 31 Desember 2013 | % Dari  Total Aset |
| Aset Lancar  Aset Tetap  Aset Lainnya | 10,442,250.00  12,656,240,312.00  332,527,910.00 | 0.08%  97.36%  2.56% | 8,402,300.00  12,958,712,189.00  355,625,543.00 | 0.06%  97.27%  2.67% |
| Total Aset | 12,999,210,472.00 | 100.00% | 13,322,740,032.00 | 100.00% |
| *Sumber : Laporan Keuangan Sek retariat DPRD Kota Buk ittinggi Tahun 2012-2013* | | | | |

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan proporsi asset pada asset lancar sebesar 0,02 % dan asset tetap sebesar 0,09%. Sementara untuk asset lainnya terjadi peningkatan sebesar 0,11%.

**Tabel 4.5. Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total AsetSekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2013-2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategori Aset** | **31 Desember 2013** | **% Dari**  **Total Aset** | **31 Desember 2014** | **% Dari**  **Total Aset** |
| Aset Lancar  Aset Tetap  Aset Lainnya | 8,402,300.00  12,958,712,189.00  355,625,543.00 | 0.06%  97.27%  2.67% | 12,592,299.00  15,267,930,448.00  603,026,959.00 | 0.08%  96.12%  3.80% |
| Total Aset | 13,322,740,032.00 | 100.00% | 15,883,549,706.00 | 100.00% |
| *Sumber : Laporan Keuangan Sek retariat DPRD Kota Buk ittinggi Tahun 2013-2014* | | | | |

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan proporsi asset pada asset lancar hanya sebesar 0,02 % dan asset lainnya sebesar 1.13%. Sedangkan untuk asset tetap terjadi penurunan sebesar 1,15%.

1. **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**

**Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD**

**Kota Bukittinggi Tahun 2012**

**Pemerintah Kota Bukittinggi SKPD : 12004 - Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Rek. | Rekening | Anggaran Setelah | Realisasi | Lebih/Kurang |
| **1** | **PENDAPATAN** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **-** | **-** | **-** |
| 111 | Pendapatan Pajak Daerah | - | - | - |
| 112 | Pendapatan Retribusi Daerah | - | - | - |
| 113 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan | - | - | - |
| 114 | Lain-lain pendapatan asli adaerah yang sah | - | - | - |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **BELANJA** | **16,922,537,120.00** | **10,961,386,257.00** | **5,961,150,863.00** |
| **21** | **BELANJA OPERASI** | **16,153,429,120.00** | **10,284,831,904.00** | **5,868,597,216.00** |
| 211 | Belanja Pegawai | 2,394,062,000.00 | 2,032,450,889.00 | 361,611,111.00 |
| 212 | Belanja Barang dan Jasa | 13,759,367,120.00 | 8,252,381,015.00 | 5,506,986,105.00 |
| **22** | **BELANJA MODAL** | **769,108,000.00** | **676,554,353.00** | **92,553,647.00** |
| 221 | Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| 222 | Belanja Peralatan dan Mesin | 563,108,000.00 | 514,406,353.00 | 48,701,647.00 |
| 223 | Belanja Gedung dan Bangunan | 179,500,000.00 | 147,975,000.00 | 31,525,000.00 |
| 224 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 |
| 225 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 19,500,000.00 | 14,173,000.00 | 5,327,000.00 |
|  | **Jumlah Belanja** | **16,922,537,120.00** | **10,961,386,257.00** | **5,961,150,863.00** |
|  | **Surplus / Defisit** | **(16,922,537,120.00)** | **(10,961,386,257.00)** | **(5,961,150,863.00)** |
| *Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012* | | | | |

**Tabel 4.7 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD**

**Kota Bukittinggi Tahun 2013**

**Pemerintah Kota Bukittinggi SKPD : 12004 - Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Rek. | Rekening | Anggaran Setelah  Perubahan | Realisasi | Lebih/Kurang |
| **1** | **PENDAPATAN** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **-** | **-** | **-** |
| 111 | Pendapatan Pajak Daerah | - | - | - |
| 112 | Pendapatan Retribusi Daerah | - | - | - |
| 113 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan | - | - | - |
| 114 | Lain-lain pendapatan asli adaerah yang sah | - | - | - |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **BELANJA** | **18,896,597,431.00** | **13,766,272,529.00** | **5,130,324,902.00** |
| **21** | **BELANJA OPERASI** | **18,382,991,431.00** | **13,331,666,519.00** | **5,051,324,912.00** |
| 211 | Belanja Pegawai | 3,009,565,506.00 | 2,543,831,106.00 | 465,734,400.00 |
| 212 | Belanja Barang dan Jasa | 15,373,425,925.00 | 10,787,835,413.00 | 4,585,590,512.00 |
| **22** | **BELANJA MODAL** | **513,606,000.00** | **434,606,010.00** | **78,999,990.00** |
| 221 | Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| 222 | Belanja Peralatan dan Mesin | 269,106,000.00 | 221,849,210.00 | 47,256,790.00 |
| 223 | Belanja Gedung dan Bangunan | 200,000,000.00 | 193,429,000.00 | 6,571,000.00 |
| 224 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 35,000,000.00 | 12,922,000.00 | 22,078,000.00 |
| 225 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 9,500,000.00 | 6,405,800.00 | 3,094,200.00 |
|  | **Jumlah Belanja** | **18,896,597,431.00** | **13,766,272,529.00** | **5,130,324,902.00** |
|  | **Surplus / Defisit** | **(18,896,597,431.00)** | **(13,766,272,529.00)** | **(5,130,324,902.00)** |
| *Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2013* | | | | |

**Tabel 4.8 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD**

**Kota Bukittinggi Tahun 2014**

**Pemerintah Kota Bukittinggi SKPD: 12004 - Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No Rek. | Rekening | Anggaran Setelah  Perubahan | Realisasi | Lebih/Kurang |
| **1** | **PENDAPATAN** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **-** | **-** | **-** |
| 111 | Pendapatan Pajak Daerah | - | - | - |
| 112 | Pendapatan Retribusi Daerah | - | - | - |
| 113 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | - | - |
| 114 | Lain-lain pendapatan asli adaerah yang sah | - | - | - |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **BELANJA** | **18,711,895,742.00** | **14,043,356,425.00** | **4,668,539,317.00** |
| **21** | **BELANJA OPERASI** | **15,754,095,742.00** | **11,484,836,750.00** | **4,269,258,992.00** |
| 211 | Belanja Pegawai | 2,708,262,634.00 | 2,548,099,878.00 | 160,162,756.00 |
| 212 | Belanja Barang dan Jasa | 13,045,833,108.00 | 8,936,736,872.00 | 4,109,096,236.00 |
| **22** | **BELANJA MODAL** | **2,957,800,000.00** | **2,558,519,675.00** | **399,280,325.00** |
| 221 | Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| 222 | Belanja Peralatan dan Mesin | 2,925,800,000.00 | 2,553,839,675.00 | 371,960,325.00 |
| 223 | Belanja Gedung dan Bangunan | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 224 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| 225 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 12,000,000.00 | 4,680,000.00 | 7,320,000.00 |
|  | **Jumlah Belanja** | **18,711,895,742.00** | **14,043,356,425.00** | **4,668,539,317.00** |
|  | **Surplus / Defisit** | **(18,711,895,742.00)** | **(14,043,356,425.00)** | **(4,668,539,317.00)** |
| *Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2014* | | | | |

**Tabel 4.9 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja**

**Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2013-2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2012** | | **Tahun 2013** | | **Kenaikan/Penurunan** | | |
| **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **%** |
| Belanja Pegawai | **2,394,062,000** | 2,032,450,889 | **3,009,565,506** | 2,543,831,106 | 615,503,506 | **(511,380,217)** | -25.16% |
| Belanja Brang dan Jasa | 13,759,367,120 | 8,252,381,015 | **15,373,425,925** | 10,787,835,413 | 1,614,058,805 | **(2,535,454,398)** | -30.72% |
| Belanja Modal | 769,108,000 | 676,554,353 | **513,606,000** | 434,606,010 | (255,502,000) | **241,948,343** | 35.76% |
| **Total** | **16,922,537,120** | **10,961,386,257** | **18,896,597,431** | **13,766,272,529** | **1,974,060,311** | **2,804,886,272** | **25.59%** |

**Tabel 4.10 Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja**

**Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2013** | | **Tahun 2014** | | **Kenaikan/Penurunan** | | |
| **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **%** |
| Belanja Pegawai | **3,009,565,506** | 2,543,831,106 | **2,708,262,634** | 2,548,099,878 | (301,302,872) | **4,268,772** | 0.17% |
| Belanja Barang dan Jasa | **15,373,425,925** | 10,787,835,413 | **13,045,833,108** | 8,936,736,872 | (2,327,592,817) | **(1,851,098,541)** | -17.16% |
| Belanja Modal | **513,606,000** | 434,606,010 | **2,957,800,000** | 2,558,519,675 | 2,444,194,000 | **2,123,913,665** | 488.70% |
| **Total** | **18,896,597,431** | **13,766,272,529** | **18,711,895,742** | **14,043,356,425** | **(184,701,689)** | **277,083,896** | **2.01%** |

Berdasarkan Hasil Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 pada table 4.9, dan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total belanja Tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 25,59% dengan nilai Rp.2.804.886.272,- dari tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2014 peningkatan Belanja sebesar 2,01% atau senilai Rp. 277.083.896,- dari Tahun 2013.

Jika dilihat dari jumlah anggaran belanja Tahun 2013, maka anggaran belanja mengalami peningkatan senilai Rp. 1.974.060.311,- dari tahun sebelumnya. Sementara pada Tahun 2014 terjadi pengurangan Anggaran Belanja sebesar Rp. 184.701.689,-. Hal ini terjadi Karena adanya pengurangan penganggaran untuk belanja barang dan jasa.

**Analisis Pertumbuhan Belanja**

**Analisis varian belanja**

**Tabel 4.11 Laporan Realisasi Anggaran Belanja**

**Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012-2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2012** | | **% Realisasi**  **Belanja** | **Tahun 2013** | | **% Realisasi**  **Belanja** | **Tahun 2014** | | **% Realisasi**  **Belanja** |
| **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** |
| Belanja Pegawai | **2,394,062,000.00** | 2,032,450,889.00 | 18.54% | **3,009,565,506.00** | 2,543,831,106.00 | 18.48% | **2,708,262,634.00** | 2,548,099,878.00 | 18.14% |
| Belanja Brang dan Jasa | 13,759,367,120.00 | 8,252,381,015.00 | 75.29% | **15,373,425,925.00** | 10,787,835,413.00 | 78.36% | **13,045,833,108.00** | 8,936,736,872.00 | 63.64% |
| Belanja Modal | 769,108,000.00 | 676,554,353.00 | 6.17% | **513,606,000.00** | 434,606,010.00 | 3.16% | **2,957,800,000.00** | 2,558,519,675.00 | 18.22% |
| **Total** | **16,922,537,120.00** | **10,961,386,257.00** | **100.00%** | **18,896,597,431.00** | **13,766,272,529.00** | **100.00%** | **18,711,895,742.00** | **14,043,356,425.00** | **100.00%** |

* 1. Analisis Belanja Pegawai

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 realisasi belanja pegawai sebesar 18,54% atau senilai Rp. 2.032.450.889,- dari total belanja senilai Rp.10.961.386.257,-

Pada Tahun 2013, realisasi belanja pegawai sebesar 18,48% atau senilai Rp. 2.543.831.106,- dari total belanja senilai Rp.13.766.272.529,-Sementara pada Tahun 2014, Realisasi belanja pegawai sebesar 18,14% atau senilai Rp. 2.548.099.878,- dari total belanja senilai Rp.14.043.356.425,-.

* 1. Analisis Belanja Barang dan jasa

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 201 realisasi belanja barang dan jasa sebesar 75,29% atau senilai Rp. 8.252.381.015,- dari total belanja senilai Rp.10.961.386.257,-

Pada Tahun 2013, realisasi belanja barang dan jasa sebesar 78,36% atau senilai Rp. 10.787.835.413,- dari total belanja senilai Rp.13.766.272.529,-

Sementara pada Tahun 2014, realisasi belanja barang dan jasa sebesar 63,64% atau senilai Rp. 8.936.736.872,- dari total belanja senilai Rp.14.043.356.452,-

* 1. Analisis Belanja Modal

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 realisasi belanja modal sebesar 6,17% atau senilai Rp. 676.554.353,- dari total belanja senilai Rp.10.961.386.257,-

Pada Tahun 2013, realisasi belanja modal sebesar 3,16% dari total belanja atau senilai Rp. 434.606.010,- dari total belanja senilai Rp.13.766.272.529,- Sementara pada Tahun 2014, realisasi belanja modal sebesar 63,64% atau senilai Rp. 2.558.519.675,- dari total belanja senilai Rp.14.043.356.452,-

**Analisis rasio efisiensi belanja**

**Tabel. 4.12. Kriteria Penilaian Effisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosentase Kinerja Keuangan** | **Kriteria** |
| 100% keatas | Tidak effisien |
| 90%-100% | Kurang efisien |
| 80%-90% | Cukup efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Dibawah 60% | Sangan efisien |

*Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996*

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Rasio Tingkat Effisiensi APBD Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Anggaran Belanja**  **( Rp )** | **Realisasi Belanja**  **( Rp )** | **Rasio**  **( % )** | **Ket** |
| 2012 | **16,922,537,120.00** | 10,961,386,257.00 | 64.77% | efisien |
| 2013 | 18,896,597,431.00 | 13,766,272,529.00 | 72.85% | efisien |
| 2014 | 18,711,895,742.00 | 14,043,356,425.00 | 75.05% | efisien |
| **Rata-Rata** | **18,177,010,097.67** | **12,923,671,737.00** | **70.89%** | **efisien** |

Dari Rasio Effisiensi belanja diatas, dengan mengacu pada table 4.6 rasio efisiensi Belanja Sekretariat DPRD dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 kurang dari 80 % masuk pada kategori efisien yang artinya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah mampu menggunakan anggaran belanja yang ada dengan cukub bijakjsana dan dapat mencapai tingkat effisiensi belanja yang baik.

**PEMBAHASAN HASIL ANALISIS**

1. **Pembahasan Hasil Analisis Masalah Pertama**

Penyusunan Lapaoran Keuangan Tahunan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menuyusun Lapaoran Keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.
4. **Pembahasan Hasil Analisis Masalah Kedua**
5. Analisis Neraca Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan tiap-tiap pos asset dalam neraca Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan. Adapun terjadinya penurunan pada tahun 2013 yaitu pada asset lancar, hal ini terjadi karena hasil sisa stock opname pada akhir tahun 2013 tidak sebesar tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari proporsi kelompok asset Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi asset tetap memiliki proporsi lebih dari 90% dari seluruh total asset Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Artinya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi jika dilihat dari Neraca Sekretariat DPRD Kota Bukittinngi adalah baik.
6. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang dilihat dari anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang terus meningkat setiap tahun dan diiringi dengan peningkatan realisasi belanjanya dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sudah baik. Sementara jika dilihat dari Analisis Rasio Effisiensi Belanja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang setiap tahunnya dibawah 80% dan masuk kategori effisien. Artinya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah mampu menggunakan anggaran belanja yang ada dengan cukub bijakjsana.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari analisis terhadap Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi untuk Tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari Pengujiaan Hipotesis Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dapat dilihat hasilnya h-hitung < h-tabel sehingga hipotesis dapat diterima dengan derajat kesalahan (α) = 5% yang berarti bahwa Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah memiliki kinerja keuangan yang cukup baik jika dilihat dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Ini dapat terlihat dari posisi asset dimana pertumbuhan tiap-tiap asset yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 telah mampu menggunakan anggaran belanja yang ada dengan cukup bijakjsana dan dapat mencapai tingkat effisiensi belanja yang baik.

**Saran**

Untuk mengatasi masalah yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Menjadikan Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi menjadi lebih baik lagi dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diharapkan dapat menganggarkan kebutuhan belanjanya dengan lebih cermat lagi agar tidak terjadi lagi SILPA ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ) yang cukub besar.
2. Sebaiknya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi terutama dibidang Keuangan agar terus mengevaluasi kinerjanya dalam penyusunan Laporan Keuangan agar Laporan yang dihasilkan bisa semakin lebih baik lagi untuk kedepannya.
3. Sekretariat DPRD Khususnya di bidang keuangan, perlu merevisi susunan staf yang terkait dalam pembuatan laporan keuangan untuk menempatkan Sarjana Akuntansi yang berkompeten saja dalam pembuatan Laporan keuangan.
4. Perlu adanya peningkatan kopetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta bimbingan teknis kepada sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi khususnya bagi pembuat Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukiitinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat

Agussalim, Manguluang, 2010, *Metodologi Penelitian*, Ekasakti Press, Padang

Agussalim, Manguluang, 2013, *Statistik*, Ekasakti Press, Padang

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*: Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga

Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta

Ihyanul Ulum, 2004, Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik, UMM Press: Malang

Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat, 2007

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Sinar Grafika

Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo, 2002, Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, JAAI

Munawir, 2002. Analisa Laporan Keuangan. Liberty. Yogyakarta. Niswonger, Warren, Reeve and Fees.2005

Suhanda, 2007, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta: Salemba Empat

Sumarso, 2002, Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.

Tampubolon, Manahan, 2005, Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia

Warsono, 2003, Manajemen Keuangan. Malang; Bayumedia

Fauziah, 2011, Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Limapuluh Kota

Endah Rika Rahim, 2013, Analisis Laporan Keuangan Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2010 dan 2011 sebagai dasar pengukuran kinerja Keuangan

Joko Pramono, Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Sari Julia, 2013, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: Study Kasus Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 di Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, 2012

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, 2013

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, 2014